TARBAWY
Indonesian Journal of Islamic Education
Vol. 10 No. 2 November 2023 (pp. 1- 20) DOI: 10.17509/t.v10i2.
ISSN : 2580-6181 (Print), 2599-2481 (Online)
Available online at: https://ejournal.upi.edu/index.php/tarbawy/index

Analisis Kebijakan Guru PAI dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Siswa Inklusi dan Siswa Reguler di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta

Author (s):
Risma Wardani, Mutohharun Jinan

Affiliation (s):
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Corresponding author:
g000200136@student.ums.ac.id, mj123@ums.ac.id

Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh observasi yang menunjukkan kurang maksimalnya proses pembe;ajaran yang dilaksanakan guru PAI dalam proses pembelajaran, terkhusus di sekolah inklusi sehingga tujuan pendidikan sulit tercapai. Hal ini memberikan dampak yang besar bagi siswa inklusi dan siswa regulerr sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak maksimal dan kurang efektif. Sehingga dapat dirumuskan dalam penelitian ini bahwa peran guru dalam memaksimalkan preancangan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran sangat diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam sehingga mengetahui implikasinya terhadap siswa inklusi dan siswa reguler maupun bagi guru PAI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif diambil dari interpretasi data guru PAI dengan memberikan keterangan dan penjelasan. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara kebijakan dan keprofesionalan guru dalam mengajar sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembelajaran sehingga dapat memberikan perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran dan memberikan dampak terhadap siswa di sekolah inklusi SMA Muhammadiyah 6 Surakarta. Kebijakan dan keprofesionalan guru berpengaruh tinggi terhadap kualitas belajar dan perkembangan siswa.

Keywords:
Kebijakan, proses pembelajaran inklusi, siswa inklusi dan siswa reguler

Article history:

Received 00 Jan 20xx
Revised 00 Jan 20xx
Accepted 00 Jan 20xx
Available online 00 Jan 2xx

Copyright: © 2023. The Authors (Corresponding author). Licensee: TARBAWY. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial ShareAlike 4.0 License.

Introduction

Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang berarti kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75). Abidin (2006:17) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur prilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Dunn, 1999). Carter V Good (1959) memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga.

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, dipaparkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perihal ini kemudian, dipertegas dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Hak mendapatkan pendidikan diperuntukkan secara massal kepada seluruh masyarakat tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk penyandang cacat, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal (Direktorat, 2008).

Upaya pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan bagi ABK juga telah dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa, Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, serta surat edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C. C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003, yakni setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK, saat ini sudah banyak lembaga pendidikan yang mengembangkan pendidikan inklusif, mengingat cukup banyaknya jumlah ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) khusus di Indonesia. Terdapat 32 ribu sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusi diberbagai daerah, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari 1,6 juta ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di Indonesia, baru 18% yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusif. Sekitar 115 ribu ABK bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), sedangkan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang bersekolah di sekolah regular pelaksana sekolah inklusif berjumlah sekitar 299 ribu (MINA, 2017).

Berdasarkan landasan yang telah dikemukakan diatas, maka keberadaan sekolah inklusi seolah menjadi solusi terbaik bagi siswa berkebutuhan khusus untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa melalui pendidikan. Beberapa permasalahan muncul ketika konsep sekolah inklusi ini di implementasikan di lingkungan, salah satunya adalah ketidaksiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi terkait modifikasi kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi khusus, dan berbagai macam permasalahan yang sangat kompleks. Sehingga, dibutuhkan kebijakan baru yang menetapkan kriteria sekolah yang mampu menyelenggarakan konsep pendidikan inklusi, sehingga bisa berjalan maksimal.

Dengan adanya keberadaan sekolah menjadi sebuah lembaga formal penyelenggaraan pendidikan inklusi yang memiliki misi untuk keberhasilan sistem pendidikan nasional. Kepala sekolah sebagai pemimpin yang bertanggungjawab dalam menganalisis dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Perlu diperhatikan oleh kepala sekolah dalam membuat atau mengambil kebijakan baru adalah menciptakan perubahan baru. Suatu kebijakan baru yang dibuat bertujuan untuk melakukan sebuah perubahan baru. Dengan kebijakan baru dari kegiatan tersebut yang mana dalam praktiknya pasti akan ditemukan sebuah penolakan dari personel sekolah atau warga sekolah dengan menyebtukan faktor-faktor penolakan tersebut. Maka dari itu, pentingnya komitmen sejak awal oleh seluruh warga sekolah agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang berada di lembaga pendidikan. Kinerja guru di sekolah mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan sekolah. Masalah kinerja guru menjadi sorotan berbagai pihak yang harus mendapatkan perhatian sentral, karena figur seorang guru menjadi sorotan paling utama ketika berbicara mengenai masalah pendidikan. Guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan, guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah, guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik. Kinerja guru mencerminkan kemampuan kerja guru yang terlihat dari penampilan kerja guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Jika kemampuan kerja seorang guru bagus, maka kinerjanya juga semakin tinggi. Sebaliknya jika kemampuan kerja seorang guru tidak bagus, maka kinerjanya semakin rendah. Menurut Hamzah B. Uno (2012: 65) terdapat dua tugas guru yang dijadikan acuan untuk mengukur kinerja guru, kedua tugas tersebut adalah tugas yang berkaitan dengan kegiatan proses pembelajaran dan tugas yang berkaitan dengan penataan serta perencanaan yang berkaitan dengan tugas pembelajaran.

Menurut Wirawan (2009: 166) aspek-aspek yangd apat dinilai dari kinerja adalah keterampilan kerja, kualitas pekerjaan, tanggungjawab, disiplin kerja, kerja sama, dan kuantitas pekerjaan. Tutik Rachmawati (2013: 121) mengemukakan terdapat tiga kegiatan indikator penilaian kinerja guru, yaitu: perencanaan program kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Ruky (2004: 4) mengemukakan bahwa tinggi rendahnya kinerja pegawai dapat dilihat dari kejujuran, ketaatan, disiplin, inisiatif, kreativitas, adaptasi, komitmen, motivasi, sopan santun. Nitisemito (1982: 78) mengemukakan bahwa inisiatif adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam diri pegawai tanpa perintah dari pimpinan, rekan kerja ataupun orang lain seperti halnya ide-ide maupun kreasi-kreasi yang memberian manfaat terhadap pekerjaanyang dilakukan. Dari pernyataan diatas bahwa inisiatif adalah suatu sikap dari pegawai atau guru yang melaksanakan tugas atau mengambil keputusan dengan kesadaran sendiri tanpa di perintah dulu dari pemimpin.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, peneliti tertarik untuk meneliti "**Analisis Kebijakan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta**". Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang digunakan guru Pendidikan Aama Islam sehingga mengetahui dampak atas terjadinya proses pembelajaran tersebut bagi siswa inklusi dan siswa reguler di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai kualitas proses pemebelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah inklusi. Hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi kepala sekolah dan para tenaga pendidik agar memberikan proses pelaksanaan dan pelayanan pendidikan terhadap siswa inklusi dan siswa secara adil, efisien dan efektif.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prsosedur statistik atau cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang saat ini berlaku dan didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis. Serta menginterpretasikan kondisi yang sekarang.

Penelitian ini dilakukan di sekolah inklusi SMA Muhammadiyah 6 Surakarta dan dilaksanakan dalam periode bulan Oktober hingga November 2023. Informan dalam penelitian ini adalah guru PAI di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi terhadap objek yang diteliti, wawancara terstruktur, dan dokumentasi dengan mencari beberapa referensi seperti artikel, dokumen, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan fenomena-fenomena dengan kata-kata kemudian data-data tersebut dianalisis lalu dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi sumber.

Results and Discussion

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap siswa inklusi dan siswa reguler

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Dari penelitian Kurnia Julianti (2023) yang berjudul "Model Pendidikan Inklusi pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam: Studi Multisitus SDIT Luqman Al-Hakim dan SDIT Assalam" menjelaskan bahwa model pembelajaran bagi siswa inklusi merupakan hal yang penting. Penerapan pendidikan inklusi pada pembelajaran PAI perencanaan belajar dan pembiasaan kegiatan positif adalah hal utama. Perencanaan berupa RPP untuk mensukseskan pembelajaran. Selain itu, perencanaan pembelajaran berfokus kepada setiap individu dari ABK dan menerapkan PPI. Guru PAI juga menggunakan pendekatan praktis dan visual untuk mendukung pemahaman konsep agama Islam oleh siswa berkebutuhan khusus, seperti mendorong paraktik keagamaan. Model pendidikan inklusi utama yang ingin diperlihatkan dalam penelitian ini adalah bahwa memberikan layanan pendidikan dengan pendekatan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap siswa berkebutuhan khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Kusuma Wardhani (2020) yang berjudul "Persepsi dan Kesiapan Mengajar Mahasiswa Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Konteks Sekolah Inklusi". Penelitian ini menjelaskan persepsi dan kesiapan calon guru terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Hasil penelitian ini adalah bahwa perencanaan seorang guru dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus harus diperhatikan seperti PPI (Program Pembelajaran Individu). PPI adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan untuk seorang anak berkebutuhan khusus, yang merupakan sebuah hasil diskusi kesepakatan yang dilakukan oleh guru kelas, orang tua anak yang bersangkutan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, serta apabila ada psikolog yang menangani anak berkebutuhan khusus tersebut. PPI yang tepat seharusnya berisis tentang masalah yang dihadapi siswa berkebutuhan khusus dan strategi mengajar serta sarana penunjang pembelajaran.

Selanjutnya adalah penelitian dari Sutipyo Ru'iya, Fandi Akhmad, Diana Putwiyani, dan Anjar Sulistiawan (2021) yang berjudul "Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Inklusi di Yogyakarta". Penelitian ini berisi mengani tantangan guru Pendidikan Agama Islam dalam

mengajar di sekolah inklusi, diantaranya adalah tidak memiliki kompetensi tentang anak berkebutuhan khusus, sulit memahami karakteristik anak berkebutuhan khusus, dan sekolah belum memiliki guru pendamping khusus. Adanya tantangan seperti ini mengharuskan guru Pendidikan Agama Islam harus meningkatkankemampuan dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Hal ini bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan guru pendamping khusus dan banyak menambah ilmu dengan memperbanyak bacaan terkait anak berkebutuhan khusus.

Dengan meninjau penelitian-penelitian terdahulu seperti di atas, banyak menjelaskan terkait bagaimana perencanaan pembelajaran terhadap siswa inklusi dan belum banyak membahas bagaimana kebijakanyang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu sebab penelitian ini dilakukan yaitu lebih mengetahui bagaimana proses pembelajaran di sekolah inklusi yang melibatkan siswa inklusi dan siswa reguler sehingga kita mengetahui sudahkah pembelajaran yang dilaksanakan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Discussion

SMA Muhammadiyah 6 Surakarta merupakan salah satu sekolah inklusi yang berada di daerah Surakarta, dimana sekolah ini tidak hanya diperuntukkan bagi siswa reguler tetapi juga bagi siswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan data terbaru tahun 2023/2024, sekolah yang ramah difabel ini memiliki sebanyak 73 siswa dan didukung oleh 15 guru dan 2 tenaga kependidikan. Sebanyak 14 siswa diantaranya adalah siswa inklusi dengan keluhan *dwarfisme*, tunadaksa, ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), *hearing loss*, *low vision*, *psychogenic tremor*, *slow learner*, disleksia, dan tunanetra serta sebanyak 59 siswa reguler.

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh guru Pendidikan Agama Islam agar pembelajaran di kelas inklusi dapat berjalan dengan lancar, diantara kebijakan tersebut yaitu lamanya waktu pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

a. Waktu lamanya guru Pendidikan Agama Islam mengajar antara siswa inklusi dan siswa reguler

   Dalam proses pembelajaran, pengelolaan kelas merupakan bagian terpenting yang dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan kelas itu sendiri yaitu menciptakan kondisi kelas yang kondusif agar kegiatan belajar mengajar berlangsung sesuai tujuan. Pengelolaan kelas harus dilaksanakan secara maksimal dan efektif yang dapat memberikan pengaruh positif pada perilaku siswa. Bagi guru yang mengajar di sekolah inklusi, perencanaan pembelajaran harus dimaksimalkan karena tidak hanya siswa reguler yang mendapat pelayanan pendidikan, namun juga siswa berkebutuhan khusus.

   Di SMA Muhammadiyah 6, guru Pendidikan Agama Islam memberikan perhatian khusus dalam mengajar siswa inklusi, namun tidak meninggalkan siswa reguler. Artinya, setiap siswa inklusi dan siswa reguler mendapatkan porsi masing-masing sesuai kebutuhan. Pada awal pembelajaran dimulai, guru menjelaskan materi secara bersamaan kepada siswa inklusi dan siswa reguler. Kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan singkat untuk menilai pemahaman dari para siswa atas materi yang telah disampaikan. Siswa reguler yang pada dasarnya memiliki tingkat pemahaman diatas siswa inklusi dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga mudah bagi mereka untuk memahami pembelajaran materi yang telah disampaikan guru.

   Bagi siswa inklusi yang memiliki pemahaman dibawah siswa reguler, guru mengulangi materi yang telah disampaikan sebelumnya. Bagi siswa inklusi yang sulit memahami materi pelajaran seperti siswa ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) ataupun tunanetra, guru memberikan perhatian khusus seperti *face to face* dengan siswa tersebut. Siswa berkebutuhan khusus seperti tunanetra, guru memberikan waktu dan tenaga tambahan untuk memahamkan materi. Pada awalnya guru menjelaskan materi secara perlahan, apabila guru memberikan soal atau evaluasi pada materi yang telah diajarkan, maka guru akan membacakan soal dan jawaban

bagi siswa tunanetra sehingga diharapkan siswa tersebut mampu memahami materi dan mengerjakan evaluasi sehingga mampu setara dengan siswa reguler.

Siswa yang memiliki ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) juga salahsatu yang mendapatkan perhatian yang cukup banyak dari guru. Pasalnya mereka memiliki kesulitan untuk fokus. Menurut Pentecost (2004), ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) adalah gangguan pemusatan perhatian dan perilaku yakni membuat anak lebih mudah terganggu, sulit berkonsentrasi pada tugas, tidak mampu berpikir dengan tenang sebelum bertindak, sulit memperhatikan dan mendengarkan orang lain serta tidak pernah bisa diam dibandingkan dengan anak-anak lain pada umumnya sehingga seringkali anak dengan gangguan ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) kesulitan dalam menjalin hubungan pertemanan dan berkomunikasi. Adanya kondisi seperti ini terkadang membuat guru Pendidikan Agama Islam meluangkan waktu isitrahatnya untuk memberikan atau mengajarkan ulang materi kepada siswa dengan gangguan ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*).

Bagi siswa reguler, apabila mereka sudah memahami materi yang dijelaskan oleh guru, maka mereka diberi penugasan. Begitu juga dengan siswa inklusi yang sudah paham terkait materi yang disampaiakan. Dengan metode mengajar seperti ini, siswa berkebutuhan khusus sangat terbantu dalam proses pembelajaran. Mereka mampu untuk mengejar ketertinggalan pemahaman. Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran merupakan kurikulum merdeka. Artinya, guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan *student center*. Dalam pembelajaran, guru memberikan penugasan presentasi kelompok. Guru Pendidikan Agama Islam membagi kelas dengan beberapa kelompok dan menugaskan setiap kelompok untuk melakukan presentasi terkait materi. Dalam setiap kelompok presentasi, terdapat siswa inklusi dan siswa reguler. Dengan ini, diharapkan setiap siswa mampu mencari materi terkait penugasan yang akan dipresentasikan dan melatih kerjasama antar siswa.

b. Menyamaratakan evaluasi pembelajaran antara siswa inklusi dan siswa reguler

Ada tiga kata kunci yang berkaiatan denagan desain evaluasi, yaitu Tes (*test*), pengukuran (*Measurment*), dan evaluasi (*evaluation*). Dalam perencanaan dan desain sistem pembelajaran rancangan evaluasi merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan melalui evaluasi yang tepat, dapat menentukan efektivitas program dan keberhasilan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga informasi kegiatan evaluasi seorang desainer pembelajaran dapat mengambil keputusan apakah program pembelajaran yang dirancangnya perlu diperbaiki atau tidak, bagian-bagian yang mana yang dianggap memiliki kelemahan sehingga perlu perbaikan (Wina Sanjaya. 2010). Suchman memandang, "evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan" (Arikunto. 2010).

Ada beberapa fungsi evaluasi pembelajaran adalah sebagai alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa, alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan, siswa akan mengetahui bagaian mana yang perlu dan tidak perlu dipelajari, memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum, memberikan keputusan untuk mengambil keputusan khususnya untuk menentukan masa depan, berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam menentukan kejelasan tujuan yang ingin dicapai, berfungsi sebagai umpan balik untuk semua yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah (Wina Sanjaya. 2008).

Melihat urgensi evaluasi bagi siswa, guru harus mempertimbangkan bagaimana desain evaluasi bagi setiap siswa. Hal ini bertujuan agar memungkinkan guru dalam menilai aktivitas atau pengalaman mengajar yang telah dilaksanakan. Sehingga mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode mengajar yang telah dipergunakan. Dalam mengadakan evaluasi pembelajaran, guru Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta memberikan tes yang setara antara siswa inklusi dan siswa reguler. Guru membuat evaluasi untuk siswa kelas

X, IX, dan XII. Tidak hanya untuk ulangan harian, untuk UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester) soal juga disamaratakan antara siswa inklusi dan siswa reguler.

Dampak dari kebijakan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran akan memberi dampak, terkhusus dengan model dan metode belajar yang digunakan guru. Berikut dampak dari kebijakan proses pembelajaran:

a. Tercapainya tujuan penyetaraan antara siswa inklusi dan siswa reguler

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan /atau bakat istimewa, menjelaskan tujuan pendidikan inklusif yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Juga mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Dalam proses pembelajaran, guru Pendidikan Agama Islam membuat dua kelompok, yaitu siswa inklusi dan siswa reguler. Hal ini dilakukan guru agar siswa inklusi dapat mendapatkan pelayanan pendidikan yang tepat, begitupun dengan siswa reguler. Dengan seperti ini, siswa inklusi yang memiliki gangguan pendengaran atau gangguan dalam fokus dan kekurangan dalam menangkap informasi atau sejenisnya dapat terbantu serta mampu belajar dengan nyaman. Selain itu, guru juga berupaya untuk membagi penugasan kelompok dimana didalam kelompok tersebut terdiri dari siswa inklusi dan siswa reguler. Dengan seperti ini, siswa inklusi tidak merasa dibedakan dengan siswa lainnya.

b. Meningkatkan pemahaman dan prestasi akademik siswa inklusi

Menurut Daryanto (2010), kreativitas merupakan istilah yang banyak digunakan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pada umumnya orang menghubungkan kreativitas dengan produk-produk kreasi. Dengan kata lain, produk-produk kreasi itu merupakan hal yang penting untuk menilai kreativitas.guru harus mampu mengajar dengan metode pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya sebatas metode ceramah saja. Guru yang kreatif berani mencoba-hal-hal baru agar dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bahwa guru dan tenaga keguruan berkewajiban menciptakan suasana guruan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis (Maulyda, 2018).

Woods (1995) mengungkapkan bahwa kreativitas guru dapat dilihat dari bagaimana seorang guru dapat memandu siswa sesuai teori-teori pedagogik tertentu dan pembelajaran yang meliputi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran khususnya pada teori-teori pembelajaran (Kegiatan Belajar Mengajar), konsep pembelajaran, serta teknis pembelajaran. Hal ini berdampak pada sesuatu yang harus dimiliki guru untuk dikembangkan kepada siswa yang berkaitan langsung dengan 4C menurut *US-based Partnership for 21st Century Skills* (ATC21S) dimana diantaranya adalah *communication, collaboration, critical thinking, dan creativity* (Zubaidah, 2016).

Pernyataan Salamanca, dikota Salamanca, Spanyo (1994): (1) Semua anak sebaiknya belajar bersama (2) Pendidikan didasarkan kebutuhan siswa (3) ABK diberi layanan khususSelanjutnya karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus adalah 1) ingin dihargai , 2) bangga, 3) senang 4) ingin diperhatikan, 5) optimis, 6) merasa berguna, 7) percaya diri 8) aktif. Dalam pembelajaran inklusi guru harus menanamkan hubungan yang baik dengan peserta didik, bersikap ramah dan hangat, memuji anak berkebutuhan khusus dan membantu peserta didik lainnya. Guru juga dapat membuat pengaturan tempat

duduk yang bervariasi untuk semua seperti duduk berkelompok di lantai, membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Pada materi belajar guru dapat menyiapkan berbagai macam bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran, misalnya pelajaran matematika dapat disampaikan dengan bantuan poster, alat peraga dan metode bermain peran. Sumber belajar dapat melibatkan peserta didik untuk membawa media belajar yang murah dan mudah didapat dan dibawa ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam mata pelajaran tertentu. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan observasi dan portofolio.

c. Siswa inklusi dan siswa reguler kurang mendapatkan evaluasi yang sesuai

Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta memberikan evaluasi pembelajaran yang sama antara siswa inklusi dan siswa reguler. Hal ini dilakukan untuk membantu meningkatkan prestasi siswa berkebutuhan khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Istilah evaluasi telah diartikan para ahli dengan cara berbeda meskipun maknanya relatif sama. Guba dan Lincoln (1985:35), misalnya, mengemukakan definisi evaluasi sebagai "*a process for describing an evaluand and judging its merit and worth*". Sedangkan Gilbert Sax (1980:18) berpendapat bahwa "*evaluation is a process through which a value judgement or decision is made from a variety of observations and from the background and training of the evaluator*". Arifin (2013:5) mengemukakan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan.

Dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui peserta didik mana yang sudah berhak meneruskan pelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan, maupun mengetahui peserta didik yang belum berhasil menguasai bahan. Dengan petunjuk ini guru dapat lebih memusatkan perhatianya kepada peserta didik yang belum berhasil. Apa lagi jika guru tahu akan sebab-sebabnya ia akan memberikan perhatian yang lebih teliti sehingga keberhasilan selanjutnya dapat diharapkan. Salah satu prinsip evaluasi adalah adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi, semua peserta didik harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua pesrta didik harus diperlakukan sama. Pendidik juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik.

Identifikasi merupakan kegiatan awal yang mendahului proses asesmen. Identifikasi adalah kegiatan mengenal atau menandai sesuatu, yang diartikan sebagai suatu proses penjaringan atau proses menemukan kasus yaitu menemukan anak yang mempunyai kelainan/masalah, atau proses pendektesian dini terhadap anak berkebutuhan khusus (Yuwono, 2015). Identifikasi bertujuan untuk menjaring atau menemukenali anak berkebutuhan khusus dari lingkungan yang heterogen untuk dicari karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing anak. Proses selanjutnya yaitu asesmen yang bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang anak terkait kekurangan, potensi serta kebutuhan yang dimilikinya. Asesmen anak berkebutuhan khusus merupakan sebuah proses yang sistematis atau komperehensif atau secara menyeluruh dalam mencari permasalahan lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan, keunggulan dan kebutuhan individu (Dewi, 2018).

Identifikasi dan asesmen dilakukan oleh sekolah inklusi sebagai langkah untuk melakukan pemetaan bagi peserta didik yang yang mempunyai kelainan atau kebutuhan khusus. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui jenis kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing anak sehingga dapat diketahui layanan pendidikan yang tepat bagi anak di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Minsih, (2020) yang menyatakan bahwa kegiatan

identifikasi dan asesmen ditujukan untuk memetakan karakteristik siswa berkebutuhan khusus dan kemudian menentukan jenis tindakan yang akan diberikan.

Siswa inklusi dan siswa reguler seharusnya mendapatkan evaluasi yang berbeda karena kebutuhan siswa inklusi dan siswa reguler berbeda. Terkhusus bagi siswa inklusi yang harus mendapatkan evaluasi sesuai dengan gangguan yang mereka alami. Bagi siswa reguler seharusnya mendapatkan evaluasi yang seperti umumnya. Apabila evaluasi disamaratakan dengan tujuan membantu siswa inklusi agar meningkatkan prestasi akademik mereka, akan membuat siswa reguler kurang terasah dan mampu menghambat perkembangan kognitif siswa reguler.

d. Guru merasa lelah

Kurangnya tenaga pendidik membuat guru merasakan beban kerja yang bertambah dan hal ini sering terlihat di banyak sekolah, salah satunya di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta. pada sekolah ini hanya terdapat satu guru Pendidikan Agama Islam sehingga memiliki beban kerja yang cukup padat. Terlebih harus menyiapkan perencanaan pembelajaran bagi siswa inklusi dan siswa reguler dari semua kelas. Akibat kekurangan guru menjadikan pembelajaran terganggu. Kekurangan guru membatasi peluang untuk mengembangkan hubungan dan mempersulit siswa untuk benar-benar terhubung dengan pendidikannya.

Selain itu, kekurangan guru juga mampu menghambat prestasi siswa dan mampu mengurangi kesempatan pendidikan. Kekurangan guru menyebabkan hilangnya atau tidak cukupnya kesempatan belajar. Mungkin ada diskontinuitas dalam penyampaian pengajaran, dan konsep-konsep kunci mungkin terabaikan sama sekali. Kejadian seperti ini membatasi kesempatan pendidikan yang dapat dan harus diterima oleh siswa. Kekurangan guru juga merupakan hal yang sulit bagi semua orang. Keadaan seperti ini berdampak besar bagi siswa yang sudah kehilangan haknya oleh sistem pendidikan, seperti siswa penyandang disabilitas. Peran guru inklusif sangat dibutuhkan.

Menurut penelitian Arismunandar (2008) disimpulkan bahwa 30,27% dari 80.000 guru menderita stres dalam bekerja. Ini berarti jumlah guru yang mengalami stres dalam bekerja sebanyak 24,000 orang. Menurut studi yang di lakukan, bahwa stres dalam bekerja akan mempengaruhi kinerja pada guru, semakin tinggi tingkat stres yang dialami oleh guru, maka produktivitas dan kinerja pada guru akan mengalami penurunan. Selain itu menurut, Indriyani (2009) ketidak mampuan guru menggatasi masalah dengan baik, seperti masalah dalam keluarga akan menimbulkan konflik dalam pekerjaan yang akan berpengaruh pada pekerjaan sehingga timbul stres dalam bekerja.

Beban guru dan sekolah semakin berat, dimana sekolah umum, sekolah sendiri belum siap baik dari segi administrasi maupun SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pelaksaan pendidikan inklusi di sekolahnya, ditambah dengan kurangnya dukungan dan kerjasaman dari semua pihak, kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah terkait pelaksanaan sekolah inklusi sehingga pelaksanaan sekolah inklusi tidak bisa berjalan maksimal. Sekolah dan guru juga belum mengetahui bagaimana pelaksanaan sekolah inklusi yang sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan pemerintah dianggap kurang bisa mensosialisasikan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan sekolah inklusi atau kebijakan tentang sekolah inklusi sendiri belum jelas dan kurangnya pelatihan yang diadakan oleh pemerintah yang bisa meningkatkan kompetensi guru.

Conclusion

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah guru dalam melaksanakan perannya dapat melakukan beberapa kebijakan atau kreatifitas dalam perencanaan dan proses pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta, guru Pendidikan Agama Islam melakukan pelayanan pendidikan secara intensif kepada siswa berkebutuhan khusus agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan menyamaratakan evaluasi bagi

siswa inklusi dan siswa reguler. Adapun implikasi dari kebijakan ini adalah tercapainya tujuan penyetaraan antara siswa inklusi dan siswa reguler serta meningkatkan pemahaman dan prestasi akademik siswa inklusi. Disisi lain, kekurangan dari kebijakan ini adalah kurang tepatnya pemberian evaluasi bagi siswa inklusi dan siswa reguler serta menjadikan guru lebih lelah.

References

Jurnals

Ru'iya, S., Akhmad, F., Putwiyani, D., & Sulistiawan, A. (2021). Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Inklusi di Yogyakarta. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, *10*(1), 70-90.

Sirojuddin, A. (2020). Budaya Supervisi Kepala Sekolah Dengan Profesionalisme Guru Di Sdn Tarik 1 Sidoarjo. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *5*(1), 119-141.

Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Alim | Journal of Islamic Education*, *3*(2), 197-208.

Tanjung, R., Supriani, Y., Arifudin, O., & Ulfah, U. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(1), 339-348.

Puspandari, K., & Sinaga, Y. (2023). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, *11*(1), 305-315.

Yuwono, I., & Mirnawati, M. (2021). Strategi Pembelajaran Kreatif dalam Pendidikan Inklusi di Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal basicedu*, *5*(4), 2015-2020.

Khotimah, H. (2019). Analisis kebijakan permendiknas no. 70 tahun 2009 tentang sekolah inklusi. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, *17*(2).

Muslimin, L. L. Y. L., & Muqowim, M. (2021). Peran Kepala Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, *7*(3), 708-718.

Gunawan, L. (2021). Komunikasi Interpersonal pada Anak Dengan Gangguan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). *Psiko Edukasi*, *19*(1), 49-68.

Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat SD. *Humanitas*, *13*(1), 50-61.

Amalia, R., Mattiro, S., & Ruswinarsih, S. (2021). Interaksi Sosial Guru Pengajar dan Murid Berkebutuhan Khusus dalam Peningkatan Prestasi Belajar di Kelas VIII F SMPN 14 Banjarmasin. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*, *1*(2).

Asrul, A., Saragih, A. H., & Mukhtar, M. (2022). Evaluasi pembelajaran.

Nugroho, W. S. (2021). Pemetaan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusi Melalui Program Identifikasi Dan Asesmen. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, *2*(1), 111-117.

Muhbar, F., & Rochmawati, D. H. (2019). Hubungan antara Tingkat Stres dengan Beban Kerja Guru di Sekolah Luar Biasa. *Jurnal keperawatan jiwa*, *5*(2), 82-86.

Wardhani, M. Kusuma. "Persepsi dan Kesiapan Mengajar Mahasiswa Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Konteks Sekolah Inklusi." *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 10.2 (2020): 152-161.

Julianti, Kurnia. "Model Pendidikan Inklusi pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam: Studi Multisitus SDIT Luqman Al-Hakim dan SDIT Assalaam." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6.10 (2023): 1371-1383.

Gusman, H. E. (2020). Hubungan gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru di SMP N Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, *2*(1), 293-301.

Istiningsih, S. (2020, September). Kreatifitas Guru dalam Mengajar di Sekolah Inklusi. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Inklusif* (Vol. 1, No. 1, pp. 39-44).